

PWI DI KOTA JAMBI 1963-1974

*Rohmo Reiyanto Pinayungan,
Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari

Abstract

PWI Jambi City is one of the organizations formed to provide services in the form of information in the mass media. Journalists are an important part of PWI's existence which can make important contributions to the development of information in the community in Jambi. The research in this paper aims to explain the history and development of the Jambi City PWI from 1963-1974 and the role of the Jambi City PWI. The research method used is the historical method, including heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography. Data sources were obtained from books and archives relating to PWI Jambi City, as well as interviews with management who were directly involved in the PWI of Jambi City. In this study using system theory in which system theory provides a very strong description model of organizational processes. The results showed that the PWI in Jambi City was formed based on the wishes and initiative of local Jambi journalists. Long before the formation of PWI in Jambi City, a local Jambi journalist organization or organization called IWD (Djambi Journalists Association) was formed. The role of PWI in providing mass media services can be seen from the activities in providing all public information descriptions. While its role is in providing protection for journalists who are members of it, PWI in Jambi City provides assistance and legal protection for journalists who are members of PWI.

Keywords: *Journalists, Indonesian Journalists Association, Press, Mass Media*

Abstrak

PWI Kota Jambi merupakan salah satu organisasi yang dibentuk untuk memberikan jasa berupa informasi dalam media massa. Wartawan menjadi bagian penting dari keberadaan PWI yang dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan informasi di masyarakat di Jambi. Penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan PWI Kota Jambi dari tahun 1963-1974 serta peranan PWI Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data didapat dari buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan PWI Kota Jambi, serta wawancara dengan pengurus yang terlibat langsung dalam PWI Kota Jambi. Di dalam penelitian ini menggunakan teori sistem yang di mana teori sistem memberikan suatu model deskripsi yang sangat kuat mengenai proses organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PWI di Kota Jambi terbentuk atas keinginan dan inisiatif wartawan lokal Jambi. Jauh sebelum terbentuknya PWI di Kota Jambi, telah terbentuk lembaga atau organisasi kewartawan lokal Jambi yang bernama IWD (Ikatan Wartawan Djambi). Peranan PWI dalam memberikan pelayanan media massa terlihat dari kegiatan dalam memberikan semua uraian informasi publik. Sedangkan peranannya dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan yang tergabung didalamnya, PWI di Kota Jambi memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap para wartawan-wartawan yang tergabung didalam PWI.

Kata Kunci : Wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia, Pers, Media Massa

A. PENDAHULUAN

PWI merupakan salah satu organisasi yang memberikan jasa pelayanan publik dalam bidang penyampaian berita berupa informasi media masa yang memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang khususnya di Provinsi Jambi. Penyampaian pada media massa tidak terlepas dari sosok yang sering disebut dengan istilah wartawan yang merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari media massa seperti halnya keberadaan PWI yang ada di Indonesia sejak tahun 1946 memberikan kontribusi penting bagi perkembangan informasi di masyarakat Jambi khususnya (Tim PWI Jambi, 2012).

Sebenarnya ada banyak alasan mengapa media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah berita. Salah satu alasannya yaitu media massa merupakan suatu bentuk komunikasi dan jembatan dalam penyampaian informasi yang akan menyebarkan pengetahuan, pengalaman dan menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain itu, media massa juga merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat dan menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan realita sosial tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok.

Salah satu tujuan dibentuknya PWI adalah untuk lebih bersatu dan terorganisasi guna melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan rakyat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup dalam keadilan dan kemakmuran, di tengah-tengah suatu dunia baru yang sarat akan informasi dan berita setiap harinya. Begitupula dengan keberadaan organisasi PWI di Kota Jambi menjadi salah satu

pendukung kemajuan dan keakuratan informasi dan berita yang beredar sejak saat itu.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Menurut Schein (1982), organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab (Dwi Sari Juniwati. 2015:6). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pun juga memiliki struktur organisasi dan saling bekerja sama untuk mengkoordinasikan aktivitasnya dalam mencapai tujuan bersama.

Di era tahun 1950an, beberapa jurnalis (wartawan) Jambi sudah ada yang menjadi anggota PWI, namun masih ada yang berinduk ke PWI cabang Sumatra Selatan. Anggota PWI pada saat itu adalah Roesmawi Raoef, AK Mahmud, Bustami Bey, Tarmizi Ilyas, M. Zen Alamsyah, H. Marpaung, Syamsul Watir, dan A. Razak. Mereka bekerja pada surat kabar terbitan Jambi yaitu Harian Peristiwa, Mingguan Berita, Harian Warta Masyarakat dan Harian Pers. Seorang wartawan dituntut oleh masyarakat agar dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga seorang wartawan harus mampu bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya. Idealisme seorang jurnalis menjadi taruhannya ketika ia harus 'berperang' melawan nuraninya sendiri. Berperang di antara tuntutan profesi dan kepentingan bisnis (keuntungan perusahaan tempat ia bekerja) yang mengharuskannya membidik suatu peristiwa yang *booming* dan layak dijual. Dalam konteks ini, bagaimana seorang wartawan membidik suatu peristiwa konflik

akan berpengaruh pula pada peran institusi media tempat ia bekerja.

Hasil penelitian Siti Heidi Karmela berjudul “Sejarah PT. Jambi Independent Pers (1973-2000)”. Menggambarkan salah satu perusahaan pers yang menjadi bagian atau anak perusahaan Jawa Pos Group, yaitu Jambi Independent meskipun pada masa sebelumnya merupakan harian mandiri. Dengan adanya penelitian ini menambah informasi bahwa di Jambi telah ada perusahaan yang bergerak dibidang informasi media masa. Sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai persatuan dari wartawan itu sendiri yang bekerja guna memberikan informasi kepada masyarakat.

Pada awalnya opini masyarakat mengenai penyebaran informasi pada tahun 1963 mengenai peranan keberadaan PWI menuai banyak pendapat baik pro maupun kontra. Pada masa pergolakan 1963-1966 perkembangan PWI sangat tergantung pada kondisi politik. Seperti peristiwa politik tahun 1965 terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI. Beberapa pengurus PWI Pusat hingga daerah juga terseret-seret dengan pergolakan ini. Setidaknya organisasi wartawan menjadi rebutan antara kelompok nasionalis dan komunis serta kelompok lain. Suasana ini juga terjadi di kepengurusan PWI perwakilan Jambi. Pada kondisi yang tidak menentu tersebut, kepengurusan PWI yang baru berjalan 2 tahun didemisionerkan PWI Pusat, akhir Oktober 1965. Agar PWI Perwakilan Jambi tetap jalan, untuk tugas sehari-hari PWI Pusat menunjuk AK Mahmud menjabat sebagai ketua (Tim PWI Jambi, 2012).

Masa pergolakan ini menjadi masa-masa sulit bagi para wartawan, banyak di antara mereka yang mendapat tekanan apalagi pergolakan G-30-S/PKI menjadi momok menakutkan bagi mereka, terlebih lagi mereka harus berhati-hati dalam menerbitkan berita. Pada masa itu PWI melakukan berbagai upaya salah satunya adalah membuat sebuah kesepakatan terutama dalam hal

perlindungan wartawan. Sejak berdirinya organisasi ini banyak perkembangan yang dirasakan khususnya dalam bidang informasi.

Dalam situasi yang terjadi terhadap para wartawan pada saat itu, PWI yang merupakan organisasi dan wadah para wartawan di Indonesia, dan PWI Kota Jambi yang merupakan wadah organisasi wartawan di Kota Jambi memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para wartawan di Kota Jambi.

Berangkat dari sejarah bagaimana awal mula berdirinya PWI menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengingat kontribusi wartawan sebagai pencari dan penyampai berita sangat mempengaruhi keakuratan data yang akan di ketahui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diajukan beberapa pertanyaan yang menjadi pembahasan, antara lain : 1). Bagaimana sejarah perkembangan PWI di Kota Jambi (1963-1974)? Sejauh mana peranan organisasi PWI dalam memberikan pelayanan media massa dalam kurun waktu (1963-1974) di Kota Jambi?

Pembahasan tersebut pertama untuk melihat latar belakang historis Keberadaan PWI di Kota Jambi (1963-1974) mulai dari faktor pendorong dan pendukungnya, tujuan, dan pihak pihak yang terlibat dalam pendirian serta manajemen pengelolaan organisasi di setiap periodeisasi perkembangan yang telah dilewatinya. Pembahasan kedua akan membahas bagaimana peranan organisasi dalam memberikan pelayanan media massa dalam kurun waktu (1963-1974) di Kota Jambi.

B. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang memiliki tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2001:89). Heuristik adalah teknik

pengumpulan data. Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan untuk mendapatkan data dan fakta sebanyak-banyaknya mengenai sejarah dan perkembangan organisasi PWI di Kota Jambi, baik secara lisan maupun tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara otentisitas kebenarannya. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber. Dalam tahap ini, setelah peneliti mendapatkan berbagai data yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan organisasi PWI di Kota Jambi, peneliti melakukan kegiatan penyaringan data-data, mana data-data yang sesuai dan yang akan dijadikan fakta sejarah dalam penulisan tentang sejarah dan perkembangan PWI di Kota Jambi ini.

Setelah melakukan kritik terhadap sumber, tahapan selanjutnya yaitu interpretasi yang merupakan tahapan dimana penulis melakukan penafsiran dan menganalisa sumber dengan cara data yang telah diperoleh dari berbagai sumber mengenai PWI di Kota Jambi kemudian diseleksi dan di analisa untuk mendapatkan penjelasan sejarah mengenai PWI di Kota Jambi secara sistematis. Dan tahapan terakhir adalah historiografi. Tahap ini merupakan upaya untuk menuangkan hasil-hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan sejarah yang objektif dan sistematis. Setelah semua data tentang PWI di Kota Jambi terkumpul, kemudian dilakukan penyaringan data dan di analisa sumber dan data tersebut, maka tahapan terakhir adalah semua data mengenai organisasi PWI di Kota Jambi dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan objektif.

Sementara untuk sumber yang digunakan berupa arsip dari PWI Kota Jambi. Selain itu juga digunakan literatur tertulis seperti buku, koran, majalah, dan lain lain

yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan PWI. Semua literatur tertulis tersebut diperoleh dari Perpustakaan Wilayah, Perpustakaan Daerah Kota Jambi, Perpustakaan Universitas Batanghari. Sumber lain yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap informan yang berhubungan dengan PWI Kota Jambi, seperti mantan Ketua PWI Kota Jambi. Wawancara ini disebut juga dengan metode sejarah lisan. Metode sejarah lisan ini berguna juga untuk mengungkapkan keterangan-keterangan penting terkait permasalahan yang tidak ditemukan dalam sumber tertulis. Setelah mencari dan mengkritik sumber sumber tersebut, tahapan berikutnya adalah interpretasi atau menghubungkan semua sumber sumber tersebut untuk dianalisis dan ditulis dalam sebuah karya sejarah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kota Jambi dan Masyarakat

Kota Jambi secara geografis terletak antara 01° 30'2,98"-01°40' 1,08" LS dan 103° 30' 1,67"-103° 40'0,22" BT, dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang dibelah oleh aliran Sungai Batanghari dari Barat ke Timur. Oleh karena itu, wilayah Kota Jambi hampir setiap tahun mengalami banjir kiriman yang tinggi rendahnya tergantung dari pasang surutnya Sungai Batanghari tersebut, sedangkan wilayah tertingginya lebih kurang 10-60 M Dpl (Informasi Kota Jambi. 2003:20).

Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 dan dinyatakan sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan UU

No.9 Tahun 1956 dan dinyatakan sebagai daerah otonom dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Dibentuknya Provinsi Jambi tanggal 6 Januari 1948, sejak itu Kota Jambi resmi menjadi ibukota Provinsi Jambi. Meskipun beberapa literatur menyebutkan pendirian Kota Jambi bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi, yaitu tanggal 6 Januari 1957, namun hari jadinya ditetapkan sebelas tahun lebih dulu sesuai Perda Kota Jambi No.16 Tahun 1985 yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dengan Surat Keputusan No. 156 Tahun 1986, dengan alasan bahwa terbentuknya Pemerintah Kota Jambi (sebelumnya disebut Kotamadya kemudian menjadi kota saja) adalah tanggal 17 Mei 1946 dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946, yang diperkuat dengan UU No.9 Tahun 1956. Kota Jambi resmi menjadi Ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan UU No.61 Tahun 1958 (Rahmawaty. 2014:21).

Kota Jambi termasuk daerah yang berpenduduk homogen yang secara garis besar terdiri dari dua golongan penduduk, yaitu yang pertama adalah golongan penduduk asli Jambi, dan yang kedua adalah golongan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari suku bangsa Bajau, suku bangsa Kerinci, suku bangsa Batih, suku bangsa Pindah, suku bangsa Penghulu dan suku bangsa Melayu yang semuanya tergolong Ras Melayu. Sedangkan penduduk pendatang terbagi atas dua golongan, yaitu penduduk yang berasal dari daerah di luar wilayah Jambi (Jawa, Banjar, Batak, Palembang, Sunda, Minangkabau) dan orang asing (India, Arab, Cina) (Depdikbud. 1983:31).

Kota Jambi juga merupakan kota yang bisa dibilang kotanya para pendatang dari belahan dunia. Alasan tersebut mengacu pada realita yang terjadi sekarang bahkan yang

terjadi sejak dahulu. Dengan bukti bahwa masyarakat Jambi setiap tahun banyak berdatangan penduduk pendatang dari luar kota Jambi. Bukti yang lain adalah di Kota Jambi memiliki masyarakat keturunan Arab yang sering disebut Arab Melayu, ada juga keturunan Cina yang biasa disebut keturunan Tionghoa, dan keturunan India, serta beberapa keturunan dari daerah di Indonesia lainnya.

Penduduk di Kota Jambi terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Kota Jambi memiliki daya tarik tersendiri sesuai dengan semboyan masyarakat Kota Jambi, aman dan beradab. Selain itu, kehidupan sosial penduduk atau masyarakat di Kota Jambi secara umum berjalan cukup harmonis meskipun dengan keberagaman etnis di dalamnya. Untuk menggambarkan keharmonisan penduduk di Kota Jambi terlihat dari penduduk asli dan penduduk pendatang yang sama-sama terlibat dalam setiap aspek kehidupan, seperti dalam pemerintahan, sosial dan ekonomi.

Setiap etnis diharuskan untuk saling menghormati karena mereka berada dalam pengayoman yang sama oleh adat Melayu Jambi. Bagaimanapun juga, kehadiran suatu etnis di suatu daerah tentu akan membawa adat mereka masing-masing. Meskipun begitu, adat tersebut perlu mendapatkan pengayoman dari adat setempat agar keberadaannya tetap dirasakan pendukungnya.

2. Sejarah PWI di Kota Jambi

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan salah satu organisasi wartawan yang ada di Indonesia. PWI pada dasarnya adalah merupakan wadah atau tempat yang menghimpun para wartawan dan sebagai wadah persatuan dan advokasi pers nasional. PWI juga merupakan organisasi wartawan Indonesia yang independen dan profesional tanpa memandang baik suku, agama, dan

golongan maupun keanggotaan organisasi kemasyarakatan. Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pada tanggal 25 Januari 1946, para wartawan berkumpul membicarakan pembentukan organisasi wartawan Indonesia. Mereka berasal dari Jakarta, Surakarta, dan Yogyakarta. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk Panitia Persiapan dan Panitia Kongres atau panitia permusyawaratan. Dua minggu kemudian digelar Kongres di Kota Solo tanggal 9-10 Februari 1946 yang dihadiri para wartawan dari sejumlah daerah, penerbit, pimpinan radio, jawatan penerangan, tokoh pejuang seperti Tan Malaka, Bung Tomo dan undangan lainnya. Pembicara dalam Kongres tersebut antara lain Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan.

Selama dua hari, Kongres akhirnya menghasilkan keputusan yang dengan suara bulat. Para utusan setuju untuk mendirikan organisasi dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia, serta menunjuk Soemanang menjadi ketuanya dibantu dengan anggotanya Sjamsudin Sutan Makmur, BM Diah, Sumantoro, Ronggo Danukusumo, Djawoto, Harsono Tjokroaminoto dan Soedarjo, untuk masa bakti 1946-1947 (Tim PWI Jambi. 2012:1). Tujuan dibentuknya PWI ini adalah untuk lebih bersatu dan terorganisasi guna melanjutkan perjuangan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rakyatnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidup dalam keadilan dan kemakmuran, ditengah-tengah suatu dunia baru yang damai, bebas dari segala bentuk penindasan imperialisme, kolonialisme dan totalitarisme.

Kelahiran PWI ditengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan lahirnya PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam menggagalkan negara-negara boneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia. Setelah PWI Pusat terbentuk, kondisi Republik Indonesia bergejolak, karena masuknya kembali Belanda dengan membonceng tentara sekutu. Berbagai aksi perlawanan terhadap sekutu. Berbagai aksi perlawanan terhadap Sekutu pun terjadi. Tidak terkecuali para wartawan juga ikut berjuang.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, di daerah-daerah di Indonesia mulai muncul pemikiran untuk mendirikan PWI dengan alasan meningkatnya jumlah wartawan seiring terbitnya surat kabar mingguan dan harian serta menjadi koresponden media daerah lain. Pada tahun 1950-an, beberapa wartawan di Jambi sudah ada yang menjadi anggota PWI, namun masih berorientasi atau berinduk ke PWI Cabang Sumatera Selatan. Di Jambi saat itu telah terbentuk lembaga yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan diskusi para wartawan Jambi yang dikenal dengan Ikatan Wartawan Djambi (IWD). Anggota PWI saat itu adalah Roesmawi Raoef, AK Mahmud, Bustami Bey, Tarmizi Ilyas, M.Zen Alamsyah, H.Marpaung, Syamsul Watir, dan A Razak TR. Pembentukan Ikatan Wartawan Djambi (IWD) digalang oleh salah seorang wartawan

Jambi yaitu AK Mahmud yang merupakan pencetus terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia Kota Jambi yang selanjutnya disebut PWI Kota Jambi.

Awal mula berdirinya, IWD (Ikatan Wartawan Djambi) tidak diterima dengan alasan sebagian besar pendirinya berada dibawah naungan PKI (Partai Komunis Indonesia) sehingga keberadaan IWD (Ikatan Wartawan Djambi) tidak berlangsung lama. Hal ini membuat beliau berpikir untuk membentuk PWI perwakilan Jambi (AK. Mahmud, wawancara: 2015). Terdapat beberapa versi yang menjelaskan tentang keberadaan dan pembentukan IWD ini. Versi pertama yaitu keberadaan IWD merupakan organisasi wartawan sebelum PWI Perwakilan Jambi terbentuk. Sebagai Ketua IWD yang pertama adalah Aminullah, seorang pimpinan Redaksi Mingguan Peristiwa yang juga merupakan anggota DPRD-GR dari utusan wartawan. Anggotanya adalah Raden Badaruddin yang juga merupakan anggota DPRD-GR dan dua anggota lainnya adalah Tarmizi Ilyas dan M. Zen Alamsyah, juga masuk ke dalam perkumpulan ini. Sementara Roesmawi Raoef, AK Mahmud, H. Marpaung, Bustami Bey, Syamsul Watir dan A. Razak TR, tetap berada di luar IWD. Mereka semua bekerja di surat kabar terbitan Jambi yaitu *Peristiwa*, *Mingguan Berita*, *Warta Masyarakat*, dan *Massa Pers* (Fakturrahman. 2014: 28). Versi lain mengatakan bahwa IWDJI sudah ada sejak tahun 1950-an yang diketuai oleh Roesmawi Raoef dengan sekretaris Bustami Bey dan bendahara H. Marpaung. IWDJI disebut-sebut sebagai cikal bakal PWI Jambi, setelah Roesmawi Raoef menerima mandat dari PWI Pusat untuk membentuk PWI Perwakilan Jambi.

Sementara itu, versi lainnya dikemukakan oleh tokoh pers Jambi yaitu AK Mahmud yang terlibat langsung dalam proses

pembentukan PWI Perwakilan Jambi. Beliau mengatakan bahwa mengingat pentingnya keberadaan organisasi yang permanen, maka pada tahun 1962, para anggota PWI di Jambi berniat membentuk PWI Perwakilan Jambi. Rencana itu disambut baik oleh Gubernur Jambi yaitu M. Jusuf Singedekane, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi yaitu M. Saleh Yasin.

Pada tahun 1962, berlangsung Kongres PWI di Jakarta. Dalam Kongres ini, AK Mahmud yang menjadi perwakilan dari Kota Jambi, dengan pertimbangannya yaitu bahwa Jambi sudah berstatus sebagai provinsi saat itu sehingga perkembangan persnya pun harus seperti provinsi lain, mengajukan agar dibentuknya PWI perwakilan Jambi (AK. Mahmud, wawancara: 2015). Namun, syarat untuk membentuk PWI perwakilan mengharuskan ada 5 orang anggota biasa dan 3 orang anggota muda. Sementara di Jambi baru ada 4 orang anggota biasa. Selanjutnya, setelah H. Marpaung, Bustami Bey, Syamsul Watir, dan A. Razak TR naik tingkat menjadi anggota biasa, maka pada tahun itu juga PWI Pusat memerintahkan anggota PWI Jambi segera menyusun persiapan pembentukan PWI Perwakilan Jambi. Melalui musyawarah dan mufakat, terbentuklah panitia persiapan pembentukan PWI Perwakilan Jambi yang terdiri dari Roesmawi Raoef yang menjabat sebagai ketua, AK Mahmud yang menjabat sebagai wakil ketua, Bustami Bey sebagai sekretaris, dan Tarmizi Ilyas sebagai bendahara. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1963, dengan dihadiri dua orang pengurus PWI Pusat, yaitu Ice Syamsuddin dan Ani Berta Simamora, diadakan acara peresmian pembentukan PWI Perwakilan Jambi di Gedung Nasional sekarang Gedung BKOW Provinsi Jambi (Tim PWI Jambi, 2012: 1).

3. Perkembangan Struktur Organisasi PWI Kota Jambi

Perkembangan PWI Kota Jambi tidak terlepas dari perkembangan pers dan surat kabar. Perkembangan pers di Kota Jambi khususnya mengalami pasang-surut akibat dari kurangnya fasilitas percetakan di wilayah Kota Jambi. Dalam hal kepemimpinan, PWI Kota Jambi menganut sistem pimpinan bentuk dewan, di mana anggota pimpinan di pilih dari dan oleh anggota permusyawaratan. Dalam sebuah organisasi, dikenal dua macam bentuk pimpinan, yaitu bentuk tunggal dan bentuk dewan atau komisi. Organisasi yang menganut sistem pimpinan bentuk tunggal maka otomatis segenap kekuasaan dan tanggung jawab organisasi sepenuhnya dipegang oleh satu orang. Sedangkan organisasi yang menganut sistem pimpinan yang berbentuk dewan atau komisi, maka segenap kekuasaan dan tanggung jawab organisasi terletak di tangan beberapa orang, yang masing-masing mempunyai kedudukan, hak atau kewajiban dan tanggung jawab yang sama atau setara (Dwi Sri Juniwati. 2014: 40).

PWI adalah organisasi wartawan Indonesia yang independen dan profesional yang secara struktural memiliki Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam Peraturan Dasar PWI Bab III Pasal 6 tentang keanggotaan, PWI beranggotakan Wartawan Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan orang yang berjasa kepada organisasi dengan pola keanggotaan bersifat stelsel aktif, organisasi aktif merekrut anggota.

Di dalam Peraturan Dasar PWI juga ditetapkan susunan keanggotaan PWI dan aturan atau syarat untuk menjadi anggota PWI. Menurut Peraturan Dasar Bab III Pasal 7, keanggotaan PWI terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Sedangkan aturan

dan syarat untuk menjadi anggota PWI terdapat di dalam Peraturan Dasar PWI Bab III Pasal 8, yang syaratnya adalah warga negara Republik Indonesia, telah diangkat menjadi wartawan yang bekerja dalam suatu media massa dan berpendidikan minimal SMU atau yang sederajat sebelum tahun 2008 dan berpendidikan minimal DIII sesudah tahun 2008, dan tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

Selanjutnya dalam Peraturan Dasar PWI Bab IV Pasal 1 tentang kepengurusan organisasi PWI tingkat kota/kabupaten, di mana pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan disahkan oleh Pengurus Pusat PWI. Pengurus PWI Kabupaten/Kota dipilih dari Anggota Biasa yang ada untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terdiri atas minimal 3 orang pengurus, masing-masing Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Pembentukan kepengurusan organisasi PWI tingkat kabupaten/Kota dilaksanakan dalam konferensi yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Sesuai Pasal 24 Bab IV dalam Peraturan Dasar PWI, konferensi ini dilaksanakan pembentukan pengurus baru (ketua), mendengar dan menilai pertanggungjawaban pengurus, dan menetapkan program kerja. Dalam Peraturan Rumah Tangga PWI Bab V Pasal 20, masa bakti Pengurus PWI tingkat Kabupaten/Kota adalah tiga tahun, dan jika terjadi lowongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus Provinsi. (<http://pwi.or.id/index.php/pd-prt>, pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 20.57).

Kepengurusan PWI Kota Jambi dibentuk berdasarkan hasil konferensi. Dalam pelaksanaannya, PWI Kota Jambi

berpedoman kepada Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan dan program PWI Perwakilan Jambi tergantung dari pemerintah daerah atau dana APBD (AK Mahmud, wawancara: 2015). Dalam hal kepengurusan, PWI di Kota Jambi sejak tahun 1963-1974 mengalami beberapa kali perubahan anggota kepengurusan. Kepengurusan PWI Perwakilan Jambi periode pertama yaitu periode 1963-1965 adalah sebagai berikut :

Ketua : Roesmawi Raoef
Sekretaris : AK Mahmud
Bendahara : M. Zen Alamsyah

Perkembangan PWI di Kota Jambi sangat tergantung dengan kondisi politik secara nasional. Pada periode 1963-1966 terjadi pergolakan politik yang berujung terjadinya pemberontakan G30S/PKI yang menyebabkan beberapa pengurus PWI Pusat hingga daerah juga terseret-seret dengan pergolakan ini. Setidaknya organisasi wartawan menjadi rebutan antara kelompok nasionalis dan komunis serta kelompok lainnya. Suasana ini juga terjadi di kepengurusan PWI Perwakilan Jambi.

Dengan kondisi yang tidak menentu, usia kepengurusan PWI Perwakilan Jambi yang baru berjalan 2 tahun, di demisioner PWI Pusat pada akhir Oktober 1965. Agar PWI Perwakilan Jambi tetap berjalan, untuk tugas sehari-hari, PWI Pusat menunjuk AK Mahmud sebagai pejabat ketua. Pada Desember 1965, tiga pengurus PWI Perwakilan Jambi yaitu Roesmawi Raoef, AK Mahmud, dan H.Marpaung berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Kongres Luar Biasa PWI. Kongres tersebut mengeluarkan kesepakatan bahwa anggota PWI yang terlibat dan ditahan terkait G30S/PKI harus dipecah dari keanggotaan PWI. Namun, di Jambi tidak ada anggota PWI yang terlibat G30S/PKI dan beberapa anggota PWI Jambi

yang sempat ditahan karena diduga terlibat akhirnya kemudian dilepaskan kembali.

Selanjutnya pada tahun 1966 dibentuk kepengurusan PWI Perwakilan Jambi yang baru. Didasari tekad ingin membangun PWI Perwakilan Jambi menjadi lebih baik, Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 042/Garuda Putih, Lettu (Inf) M.Moersjid, mengajak para anggota PWI Perwakilan Jambi membentuk kepengurusan baru. Berdasarkan Surat Pengesahan PWI Pusat Nomor : 041/PP/1966 tanggal 29 September 1966, ditetapkan pengurus PWI Perwakilan Jambi periode 1966-1968 dengan susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Ketua : M.Moersjid
Wakil Ketua : AK Mahmud
Sekretaris : Syamsul Watir
Wakil Sekretaris : Murman Thoha
Bendahara : M. Zen Alamsyah

Surat Pengesahan PWI Pusat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat yaitu H.Mahbub Djunaedi dan Sekretaris Jenderal, Drs.Jakob Oetama (Tim PWI Jambi, 2012: 6). Dalam masa kepengurusan PWI Perwakilan Jambi periode 1966-1968 anggota PWI Perwakilan Jambi bertambah dari 8 orang menjadi 20 orang. Namun mereka hanya sesekali berkumpul dan membicarakan tentang program-program PWI. Kondisi politik yang masih memanas pasca pemberontakan G30S/PKI membuat koran-koran di Jambi ngos-ngosan terbit. Surat kabar lokal di Jambi saat itu baru ada empat jenis surat kabar, yaitu Harian Peristiwa, Gema Masyarakat, Mingguan Berita, dan Massa Pers.

Penerbitan surat kabar pun tidak teratur, ada yang terbit seminggu sekali, dua minggu sekali ataupun sebulan sekali. Hal dikarenakan sarana atau alat penerbitan di Jambi saat itu tidak ada, dan sarana penerbitan terdekat hanya ada di Palembang, sehingga harus ke Palembang untuk

mencetak surat kabar (Ak. Mahmud, wawancara: 2015).

Pada tahun 1968 seharusnya diadakan pembentukan kepengurusan PWI Perwakilan Jambi yang baru. Namun, pembentukan pengurus yang baru diundur hingga tahun 1970 dikarenakan pada tahun 1969 pengurus PWI Perwakilan Jambi periode 1966-1968 sedang menghadiri Konferensi Kerja (Konker) PWI di Kinilau, Manado dan masih terus bekerja hingga tahun 1970. Pada tahun 1970 diadakan rapat pleno pemilihan pengurus PWI Perwakilan Jambi periode 1970-1973, dengan susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

Ketua	: AK Mahmud
Wakil Ketua	: H.Marpaung
Sekretaris	: Syamsul Watir
Wakil Sekretaris	: Sayuti M
Bendahara	: M.Zen Alamsyah

Dalam periode ini, pengurus dan anggota PWI Perwakilan Jambi terus memperjuangkan agar di Jambi memiliki percetakan pers yang bisa mencetak koran harian karena kehidupan PWI Perwakilan Jambi tidak terlepas dari pasang surutnya surat kabar dan percetakan. Pada masa itu, percetakan di Jambi yang ada hanya mampu mencetak koran mingguan. Salah satunya yaitu Percetakan PD Dharma Karya milik Pemda Jambi. Surat kabar masa itu umumnya masih berbentuk stensilan. Pemda Jambi memang kemudian membeli mesin cetak offset dari Taiwan. Namun, mesin cetak tersebut tidak pernah dioperasikan.

Namun, tahun 1970-an ini merupakan masa stagnasi pers di Jambi akibat percetakan PD Dharma Karya tidak berjalan lagi. Mesin cetak yang diletakkan di sebuah bangunan di kawasan Jelutung (sekarang Gedung Perpustakaan Kota Jambi), tidak pernah dioperasikan (AK Mahmud, wawancara: 2015).

Setelah kepengurusan PWI Perwakilan Jambi periode 1970-1973 berakhir, dilakukan pemilihan pengurus untuk periode 1973-1978. Pada kepengurusan ini, Syamsul Watir dipercaya menjadi ketua dan yang menjadi sekretaris adalah AK Mahmud. Mulai dari periode ini, kepengurusan PWI berlaku selama lima tahun dan program dalam periode ini masih berupa soal mesin cetak, karena surat kabar di Jambi masih dicetak berupa stensilan. Tak banyak cerita yang diperoleh tentang kepengurusan periode ini hingga akhirnya dilaksanakan kembali pemilihan pengurus PWI Perwakilan Jambi periode selanjutnya.

4. Peranan Organisasi PWI Dalam Memberikan Pelayanan Media Massa Dalam Kurun Waktu 1963-1974 Di Kota Jambi

Pengalaman menunjukkan bahwa bahan baku pengetahuan umum adalah informasi. Agar menjadi pengetahuan umum, informasi harus diinterpretasikan dan diberi konteks tertentu (Ericson dalam Fatkurrahman, 2014:74). Informasi antara lain terdiri dari berita, laporan, data statistik, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan penting, resolusi. Media massa memahami betul bahwa informasi adalah roh dalam kehidupan alam jurnalistik. Maka berbagai informasi baru, unik, aktual, kontroversi, proximity, magnitude, dramatik, tokoh, eksklusif, dan mission akan senantiasa menjadi menu yang disuguhkan kepada khalayak (Fatkurrahman, 2014:74). Keberadaan PWI di Kota Jambi sangat memberikan peranan dan kontribusi positif dalam perkembangan informasi pada tahun 1963 hingga tahun 1974.

Dalam memberikan pelayanan media massa, PWI di Kota Jambi memiliki peranan berupa memberikan semua uraian informasi publik mulai dari masalah politik, pendidikan, kriminal dan masalah-masalah

publik lainnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena media massa di Kota Jambi pada era tahun 1963 hingga tahun 1974 hanya diterbitkan satu kali dalam seminggu, maka informasi yang diberikan pun tidak bisa disampaikan setiap hari. Jika ada hari-hari besar, surat kabar atau media massa dapat terbit hingga empat kali dalam seminggu. Namun dalam perkembangan selanjutnya, penyampaian informasi pun dapat disampaikan secara rutin diterbitkan harian.

Keberadaan PWI Kota Jambi sebagai salah satu wadah yang akan menyampaikan informasi dalam bentuk media cetak sempat menjadi polemik di tahun 1973, setelah surat kabar diterbitkan dengan menggunakan kertas stensil. PWI Kota Jambi juga merupakan komunikator dan stabilisator antara pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan media massa dan informasi. Dalam peranannya sebagai komunikator, PWI Kota Jambi melalui berbagai media massa memberikan informasi mengenai proses pembangunan, terutama pembangunan dalam wilayah Kota Jambi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa media massa dan wartawan yang merupakan bagian dari PWI, maka pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Maka dalam hal ini, PWI Kota Jambi posisinya dan peranannya adalah sebagai jembatan komunikator antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, PWI Kota Jambi melalui media massa berperan aktif dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan daerah dan badan publik lainnya. Misalnya,

wartawan yang merupakan bagian dan anggota dari PWI, dalam mengungkap kasus-kasus kepentingan publik yang melibatkan penguasa atau pejabat publik, seperti kasus korupsi atau kasus pencemaran lingkungan hidup, akan menggali semua informasi apapun, baik tertulis, rekaman suara, dan atau gambar dari pihak mana pun (narasumber baik di lembaga negara, lembaga nonpemerintah, maupun di kalangan dari jalanan).

Salah satu contoh bentuk peranan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Jambi dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah seperti dalam hal pengawasan dalam pemberitaan pelaksanaan pemilihan umum calon gubernur Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam kegiatan ini, PWI terus memantau kegiatan para wartawan atau jurnalis dalam memberitakan proses dan hasil pemilu kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan pemihakan terhadap salah satu calon legislatif, agar semua pemberitaan bersifat netral dan tidak ada pencitraan terhadap salah satu caleg yang didukungnya. Selain itu, PWI di Kota Jambi dan para wartawan didalamnya bersama media massa juga turut memberikan kontribusinya dalam penyiaran berita jalannya proses pemilu, dan penghitungan suara pemilu. Ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan detail mengenai pelaksanaan dan hasil pemilu.

5. Peranan Organisasi PWI Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Wartawan di Kota Jambi

Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (equality before the law). Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara

hukum dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Tidak terkecuali orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang biasa dikenal dengan wartawan.

Wartawan pada saat sebelum kemerdekaan bahkan setelah kemerdekaan sebelum terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia, keadaan wartawan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi khususnya mengalami pasang-surut bahkan kesulitan dalam kehidupan pers dan kewartawannya. Di mulai dari pengekangan yang menyebabkan para wartawan tidak leluasa menjalankan kebebasan berpendapat secara objektif, wartawan dijadikan sebagai alat atau corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden, bahkan sampai dengan penahanan dan pengasingan.

Dalam hal kebebasan pers ini, sebagaimana halnya profesi yang lain, kebebasan tetap dibatasi dengan nilai-nilai kode etik persnya. PWI dalam peranannya membantu wartawan-wartawan mengatasi masalah-masalah kebebasan pers dan kewartawanan, PWI yang merupakan organisasi wartawan di Indonesia dan di Kota Jambi khususnya memberikan bantuan kepada wartawan. PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik kepada setiap wartawan dan insan pers agar dalam pemberitaan dan pemberian informasi tidak terjadi penyimpangan sehingga para wartawan dapat mengeluarkan pendapat dan informasi sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik.

Selain itu, di dalam program kerja PWI di Kota Jambi, selain memberikan pelayanan dan wadah untuk para wartawan di Kota Jambi, PWI di Kota Jambi juga memberikan perlindungan kepada para wartawan yang tergabung menjadi anggota PWI di Kota Jambi. PWI di Kota Jambi memiliki advokasi hukum (AK. Mahmud, wawancara: 2015) yang akan memberikan perlindungan hukum

bagi wartawan yang menjalankan profesinya. Hal ini pun termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab III Pasal 8 yaitu “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah adanya jaminan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan wartawan disini harus disertai dengan rasa tanggung jawab penuh dalam mencari informasi kebenaran akan suatu berita yang didasarkan pada fakta.

Selain itu, PWI di Kota Jambi juga membantu perselisihan dengan manajemen media massa di tempat para wartawan bekerja. Dalam hal ini, PWI diwakili oleh Ketua Tim Pembelaan Wartawan. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, PWI di Kota Jambi juga melakukan upaya perlindungan kepada wartawan dalam bentuk memperjuangkan dan memantau pelaksanaan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya di media massa tempat merekabekerja.

<https://zainuddinjambi.wordpress.com/prt-pwi/pada tanggal 12 Desember 2015>, pukul 19.00.

PWI Kota Jambi, dalam fungsi dan peranannya, tidak hanya berperan dalam menjaga kebebasan pers (wartawan), meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan, namun PWI di Kota Jambi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Tentang Pers pada setiap lembaga pers di Kota Jambi.

Salah satu contoh bentuk peranan PWI di Kota Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap para wartawan di

Jambi adalah seperti dalam kasus kekerasan terhadap salah satu wartawan di Jambi, yaitu Rani. Dalam kasus ini, Rani mengalami intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan dari pihak kepolisian saat hendak meliput penggerebekan pesta narkoba oleh Polresta Jambi pada tanggal 11 Agustus 2015. Dokumentasinya dipaksa dihapus dan ia dibawa paksa oleh kepolisian ke dalam mobil dengan pelaku yang diborgol. Rani bahkan diancam dipukul oleh petugas kepolisian.

Dalam kasus ini, PWI dan beberapa organisasi jurnalis lainnya mendampingi Rani dan membantu dalam menyelesaikan masalahnya dengan menuntut kepada Kapolda Jambi untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum polisi tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh wartawan di Jambi, khususnya Rani. Mursyid Sonsang, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi, meminta kepada pihak aparat kepolisian untuk lebih menghargai profesi wartawan. Karena menurutnya, baik polisi maupun wartawan sama-sama menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat dan sama-sama dilindungi undang-undang. Polisi bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat, sedangkan wartawan juga bertugas memberikan informasi untuk masyarakat luas (<http://jambi.tribunnews.com/2015/08/13/breaking-news-kekerasan-pada-wartawati-puluhan-jurnalis-demo-polda-jambi>, pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 17.00).

D. KESIMPULAN

Wartawan atau jurnalis adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalisme. Wartawan merupakan kekuatan keempat dalam sebuah negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Wartawan juga memiliki peranan penting dalam

penyebaran informasi atau berita kepada masyarakat (khalayak). Wartawan tercatat sebagai patriot bangsa sebagai perintis perjuangan, bersama para pejuang ikut berjuang melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di masa pergerakan, wartawan menyandang peran sebagai aktivis pers yang melaksanakan kegiatan pemberitaan sekaligus berperan sebagai aktivitas politik yang terjun langsung dalam perjuangan melawan penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, wartawan (pers) nasional dan daerah mengalami perubahan fungsi, dari perjuangan berubah menjadi pers partisan yang menjadi corong partai politik.

Aktivitas atau kegiatan jurnalistik para wartawan nasional dan daerah sebelum terbentuknya PWI di Kota Jambi sangat memprihatinkan. Para wartawan mengalami banyak pengkekangan bahkan penindasan. Berbagai ancaman akan kehilangan pekerjaan, ancaman dipenjara, bahkan ancaman kematian pun selalu ditujukan kepada para wartawan atau insan pers. Para wartawan pun dalam menerbitkan hasil karya jurnalistiknya bahkan tidak sesuai dengan idealisme mereka masing-masing. Pemerintah atau para penguasa terlalu mengontrol isi materi jurnalistik, sehingga wartawan tidak memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya ke dalam karya jurnalistiknya.

Melihat kondisi wartawan tersebut, para wartawan membentuk organisasi yang menaungi para wartawan Indonesia yang diberi nama Persatuan Wartawan Indonesia, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 9 Februari 1946 di Solo. Kelahiran PWI pusat ini seakan memberikan angin segar bagi wartawan Indonesia. Pada tahun 1962, pada saat Kongres di Jakarta, AK Mahmud yang menjadi perwakilan wartawan dari Kota Jambi mengajukan agar

dibentuknya PWI Perwakilan Jambi. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 1963 diadakan peresmian pembentukan PWI Perwakilan Jambi.

Perkembangan PWI Kota Jambi tidak terlepas dari perkembangan pers dan surat kabar. Perkembangan pers di Kota Jambi khususnya mengalami pasang-surut akibat dari kurangnya fasilitas percetakan di wilayah Kota Jambi. PWI Kota Jambi dalam menjalankan kegiatannya memiliki peranan dalam memberikan pelayanan media massa dan kontribusinya dengan memberikan informasi publik, baik mengenai informasi politik, pendidikan, kriminal, dan informasi publik lainnya. Selain itu, PWI Kota Jambi juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada para wartawan di Kota Jambi berupa perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum kepada para wartawan di Kota Jambi khususnya, para wartawan mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya dan mengemukakan pendapatnya sesuai dengan idealismenya. Kebebasan wartawan ini pun juga disertai dengan rasa tanggung jawab penuh dalam mencari informasi kebenaran akan suatu berita yang didasarkan pada fakta.

E.DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Tim PWI Jambi. 2012. *Selayang Pandang PWI Jambi*.

Buku:

Noname. 2003. *Informasi Kota Jambi*. 2003. Jambi: Bagian Humas Informasi dan Komunikasi Daerah Kota Jambi.

_____. 1983. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Keekerabatan Pada Suku Melayu Jambi*. Jambi: Depdikbud.

Kuntowijoyo. 2001. *Pengatur Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bertang.

Artikel dan Hasil Penelitian:

Dwi Sari Juniwati. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi 1975-2000, *Skripsi* (Jambi: FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari).

Rahmawaty, Perusahaan Saimen Bakery Di Kota Jambi 1985-2014, *Skripsi*, (Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari Jambi, 2014).

Fatkurrahman, Jawa Pos Group di Kota Jambi 1995-2006, *Skripsi* (Jambi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi, 2014),

Wawancara:

AK Mahmud, Anggota PWI cabang Jambi. Jumat 31 Mei 2015.

Sumber Lainnya:

Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI, diakses dari <http://pwi.or.id/index.php/pd-prt>, pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 20.57.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diakses dari <http://pwi.or.id/index.php/uu-kej/>, pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 21.00.

Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI (Hasil Kongres XXII di Banda Aceh 27-29 Juli 2008), di akses dari <https://zainuddinjambi.wordpress.com/prt-pwi/pada tanggal 12 Desember 2015>, pukul 19.00.

Kekerasan pada Wartawati, Puluhan Jurnalis Demo Polda Jambi, diakses dari <http://jambi.tribunnews.com/2015/08/13/breaking-news-kekerasan-pada-wartawati-puluhan-jurnalis-demo-polda-jambi>, pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 17